

KPK Kembali Tahan Tersangka Penyuaup Bupati Ricky

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan satu tersangka penyuaup Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP). Tersangka penyuaup Ricky Pagawak tersebut yakni, Direktur PT Solata Sukses Membangun (SSM), Marten Todong (MT).

Marten bakal ditahan untuk masa penahanan pertamanya yakni selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini. KPK menahan Marten di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung lama KPK Kavling C1, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka MT selama 20 hari pertama terhitung 14 September 2022 sampai 3 Oktober 2022 di Rutan KPK pada Kavling C1," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/9).

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek di Pemkab Mamberamo Tengah, Provinsi Papua. Keempat tersangka tersebut yakni, Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP).

Kemudian, Direktur Utama (Dirut) PT Bina Karya Raya (BKR), Simon Pampang (SP); Direktur PT Bumi Abadi Perkasa (BAP), Jusieandra Pribadi Pampang (JPP); serta Direktur PT Solata Sukses

Membangun (SSM), Marten Todong (MT). Ricky Pagawak ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Simon, Jusieandra, dan Marten pemberi suap.

KPK telah lebih dulu melakukan proses penahanan terhadap bapak dan anak penyuaup Ricky Pagawak yakni, Simon dan Jusieandra. Sementara Marten, baru dilakukan proses penahanan, hari ini. Sedangkan Ricky Pagawak, saat ini masih diburu aparat penegak hukum karena melarikan diri.

Dalam perkara ini, Ricky Pagawak diduga menerima suap sebesar Rp24,5 miliar dari tiga pengusaha atau kontraktor yakni, Simon, Jusieandra, dan Marten. Uang itu diduga berkaitan dengan proyek yang dimenangkan oleh ketiga kontraktor tersebut di daerah Mamberamo Tengah.

Adapun, Jusieandra mendapatkan 18 paket proyek pekerjaan dengan total nilai Rp217,7 miliar, di antaranya, proyek pembangunan asrama mahasiswa di Jayapura. Sedangkan Simon, diduga mendapatkan enam paket pekerjaan dengan nilai Rp179,4 miliar. Sementara Marten, mendapatkan tiga paket pekerjaan dengan nilai Rp9,4 miliar.

Pemberian uang untuk Ricky Pagawak dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan nama-nama dari beberapa orang kepercayaan.

Tak hanya dari ketiga kontraktor tersebut, KPK menduga Ricky juga menerima uang dari pihak lainnya yang saat ini sedang ditelusuri. ● mar

2 Polhukam

FOTO: ANT



EFFENDI SIMBOLON MINTA MAAF KE TNI

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon melambatkan tangan ke arah wartawan usai memberikan pernyataan permintaan maaf atas ucapan "TNI seperti gerombolan" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).

Kejagung Buka Kemungkinan Gabungkan 2 Berkas Perkara Ferdly Sambo

"P-18, P-19 itu hanya terkait dengan kelengkapan dari perkara yang sudah, untuk menggabungkan itu kewenangan penyidik dan kita bisa jadikan satu perkara, berdasarkan kewenangan penuntut umum tadi," kata Ketut Sumedana.

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kemungkinan menggabungkan berkas perkara mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdly Sambo di kasus pembunuhan Brigadir J dan kasus obstruction of justice. Kejagung menyebut hal itu bisa terjadi karena tindak pidana yang disangkakan masih dalam satu rangkaian peristiwa.

"Itu bisa digabungkan dengan surat dakwaan berdasarkan kewenangan dari penuntut

umum. Berkas perkara ini kan ada dua, nanti oleh penyidik kalau berkas perkaranya sudah digabungkan oleh penyidik juga boleh karena berkaitan dengan peristiwa pidana," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (14/9).

Kendati demikian, Ketut belum bisa memastikan apakah dua perkara Ferdly Sambo akan dijadikan satu surat dakwaan

atau tidak. Ketut menyebut penggabungan berkas perkara itu merupakan kewenangan jaksa penuntut umum.

"P-18, P-19 itu hanya terkait dengan kelengkapan dari perkara yang sudah, untuk menggabungkan itu kewenangan penyidik dan kita bisa jadikan satu perkara, berdasarkan kewenangan penuntut umum tadi," kata Ketut.

Diketahui, Kejagung telah mengembalikan berkas perkara 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) kepada penyidik kepolisian. Jaksa memberi catatan kepada polisi agar berkas kasus dilengkapi.

"Empat berkas sudah di Kejaksaan Agung, sudah diteliti dan kami dalam proses pengembalian berkas perkara kepada penyidik," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Umum (Jampidum) Kejagung, Fadil Zumhana, di kantornya, Senin (29/8).

Jaksa meminta berkas tersebut dilengkapi agar kasus segera dibawa ke persidangan. Dia mengatakan berkas tersebut harus lengkap syarat formil-materiil sehingga bisa dibuktikan di persidangan. "Harus ada yang diperjelas oleh penyidik tentang anatomi kasusnya, tentang kesesuaian alat bukti," ucap dia.

Kejaksaan mengatakan intensif berdiskusi dengan

penyidik Bareskrim Polri agar cepat dituntaskan di pengadilan. Dia mengatakan penelitian berkas dilakukan secara cermat dan hati-hati sesuai dengan KUHAP dan pasal yang bersangkutan. Adapun berkas keempat tersangka itu adalah Bharada E atau Bharada Richard Eliezer, Bripta RR atau Bripta Ricky Rizal, KM atau Kwat Ma'rif, dan Irjen Ferdly Sambo. Diketahui, Irjen Ferdly Sambo adalah mastermind kasus pembunuhan Brigadir J. ● dro

Demokrat Buka Suara soal Lukas Enembe Jadi Tersangka KPK

JAKARTA (IM) - Gubernur Papua sekaligus politikus Demokrat, Lukas Enembe, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Demokrat menyampaikan saat ini kasus yang menjerat Lukas masih sedang pendalaman.

"Berkaitan terhadap penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka, Mehbob, Kepala Badan Hukum dan Pengamanan DPP Partai Demokrat, menyampaikan kalau kami juga sedang mendalamkannya," kata Koordinator Juru Bicara DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Rabu (14/9).

Herzaky menyebut ihwal penetapan tersangka terhadap Lukas masih belum jelas. Terlebih, menurut dia, saat ini kondisi Lukas masih sakit sehingga pihak dewan pimpinan pusat (DPP) belum bisa berkomunikasi lebih lanjut.

"Situasinya belum jelas. Kami belum bisa berkomunikasi dengan Lukas Enembe. Kami dengar beliau masih sakit," katanya.

Herzaky mengatakan parpolnya menghormati proses hukum yang berjalan. Dia meyakini KPK akan menaati asas praduga tak bersalah. Lebih lanjut, Herzaky meminta KPK tak menghambat

hak Lukas yang membutuhkan pengobatan di luar negeri. Lukas sendiri diketahui dicekal ke luar negeri oleh Imigrasi setelah jadi tersangka KPK.

"Terkait pencegahan ke luar negeri terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe yang dilakukan Ditjen Imigrasi berdasarkan permintaan KPK, kami menganggap itu hal yang biasa dalam proses penegakan hukum. Tapi, pencajukan ini sebaiknya tidak menghambat hak saudara Lukas Enembe yang saat ini sedang sakit dan masih memerlukan pengobatan secara rutin di luar negeri," ujarnya.

Herzaky lalu menyinggung prestasi Lukas selama 2 periode memimpin Provinsi Papua. Menurutnya, Lukas telah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selama memimpin.

"Yang kami tahu, Provinsi Papua selama dua periode dipimpin oleh Lukas Enembe mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selama 7 kali berturut-turut. Pemeriksaan oleh BPK tentunya melalui proses yang sangat ketat dan terukur," katanya. ● osm

FOTO: ANT



PEMERIKSAAN KASUS SUAP PEMALANG

Kepala Dinas PUPR Pemalang nonaktif Mohammad Saleh tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/9). Mohammad Saleh diperiksa terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Menteri ATR Pastikan Pengadaan Tanah di IKN Perhatikan Masyarakat Adat

BALIKPAPAN (IM) - Menteri ATR/BPN, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, memastikan pengadaan tanah untuk pembangunan yang berkaitan dengan ibu kota negara (IKN) memperhatikan hak atas tanah masyarakat khususnya masyarakat adat.

"Terkait pengadaan tanah, saya pastikan proses pengadaan tanah dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat khususnya masyarakat adat," kata Hadi, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (14/9).

Dilansir dari Antara, ia mengatakan, Kementerian ATR/BPN sendiri telah melakukan langkah-langkah percepatan dalam pembangunan IKN di antaranya membuat peta tematik pertanahan dan ruang, menyusun rencana tata ruang kawasan strategis nasional Nusantara 2022-2024 serta pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah.

"Kementerian ATR/BPN telah membuat menginventarisasi penguasaan, pemilikan, peta tematik pertanahan dan ruang untuk penggunaan,

"Pada kunjungan kali ini saya ingin memastikan apa yang menjadi tugas Kementerian ATR/BPN dalam pembangunan IKN benar-benar terlaksana dengan baik di lapangan," ujar Tjahjanto. ● mar

Tujuan utama dari pembangunan IKN ialah membangun kota pintar yang kompetitif di tingkat global. Atas hal itu, ia mengaku sangat optimis pembangunan IKN bisa berjalan sesuai dengan target yang ditentukan dengan kebijakan land freeze yang sudah dilaksanakan.

"Kami sangat optimis pembangunan IKN bisa berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Sebagaimana arahan bapak presiden bahwa pembangunan IKN ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Tujuan utamanya ialah membangun smart city yang kompetitif di tingkat global," ucapnya.

Ia didampingi Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, Rabu (14/9/2022), mengunjungi Nusanantara di Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk menindaklanjuti arahan presiden kepada dia saat dilantik yaitu mendukung pembangunan IKN melalui kebijakan tata ruang dan pengadaan tanah.

"Kunjungan kali ini saya ingin memastikan apa yang menjadi tugas Kementerian ATR/BPN dalam pembangunan IKN benar-benar terlaksana dengan baik di lapangan," ujar Tjahjanto. ● mar

Hakim Perintahkan Kabareskrim-Bharada E Hadir di Sidang Gugatan Eks Pengacara

JAKARTA (IM) - Majelis hakim melanjutkan sidang gugatan pencabutan kuasa mantan pengacara Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Deolipa Yumara dan Muhammad Boerhanuddin. Majelis hakim memerintahkan Kabareskrim, Bharada E, maupun pengacara Bharada E, Ronny Talapessy, hadir di persidangan selanjutnya.

"Kami akan melakukan pemanggilan terhadap para tergugat dengan alamat yang baru," kata hakim ketua Siti Hamidah saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (14/9).

Bukan hanya memerintahkan Kabareskrim dan Bharada E, hakim juga memerintahkan para pengugat hadir kembali pada sidang yang akan datang. Sidang ditunda dan akan kem-

bali digelar pada Rabu 21 September mendatang.

"Untuk itu, kami memerlukan waktu dan sidang ditunda satu minggu dari sekarang, yaitu hari Rabu, tanggal 21 September 2022, dan memerintahkan pengugat untuk hadir pada hari sidang dan memerintahkan untuk melakukan pemanggilan kepada para tergugat. Sidang selesai dan ditutup," kata hakim.

Diketahui, gugatan ini dilayangkan oleh Deolipa dan Boerhanuddin dengan tergugat Kabareskrim, Bharada E, dan Ronny Talapessy selaku pengacara baru Bharada E. Sidang gugatan digelar di PN Jaksel.

Dalam gugatan ini, Deolipa meminta PN Jaksel menjatuhkan hukuman membayar fee pengacara senilai Rp15 miliar. "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III

secara tanggung renteng untuk membayar biaya fee pengacara kepada para penggugat sebesar Rp15 miliar," kata Deolipa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Senin (15/8).

Deolipa mengatakan pihaknya juga menuntut supaya dia dan Boerhanuddin tetap menjadi penasihat hukum Bharada E yang sah dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Tak hanya itu, dia juga menuntut agar mempunyai hak membela Bharada E sampai di pengadilan.

"Menyatakan para penggugat adalah penasihat hukum Tergugat I yang sah. Penggugat itu adalah saya, Deolipa, dan Boerhanuddin adalah penasihat hukum Saudara Richard yang sah dan mempunyai hak untuk melakukan pembelaan sampai pada persidangan," tutur dia. ● mar

Kepala BNPT Sebut PMI Rentan Terpapar Terorisme

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Boy Rafli Amar mengatakan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) cukup rentan

terpapar terorisme sehingga diminta selalu waspada.

"Selalu waspada dari pengaruh ideologi terorisme," kata Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar saat bertemu dengan 13.886 WNI di San

Francisco, Amerika Serikat, melalui keterangan tertulis, seperti dilansir Antara, Rabu (14/9).

Menurut Boy Rafli, PMI rentan terpapar terorisme karena mereka minim pengetahuan terkait bahaya radikal terorisme.

Terbukti di sejumlah tempat seperti di Singapura dan Hong Kong ada pekerja migran yang terpapar terorisme. "Mereka juga ada yang terlibat dalam perencanaan bom bunuh diri," ungkap Boy Rafli.

Rentan-nya pekerja migran juga disebabkan adanya Foreign Terrorist Fighters (FTF) Indonesia termasuk di zona konflik Irak dan Siria. Kelompok tersebut menyebarkan paham terorisme melalui berbagai cara seperti lewat media sosial.

Kelompok teroris ini kerap menggunakan narasi agama sebagai landasan untuk bersikap intoleran, eksklusif bahkan melakukan kekerasan.

Dengan jumlah data tentang keterlibatan PMI dalam terorisme di luar negeri, Boy mengimbau agar 13.886 orang

WNI yang berada di wilayah kerja KJRI San Francisco lebih waspada. "Hindari segala bentuk ancaman radikal terorisme dan pendanaan terorisme," ucap dia.

Kunjungan kerja BNPT RI ke KJRI San Francisco menjadi salah satu agenda kerja di Amerika Serikat. Sebelumnya, Boy Rafli memimpin delegasi Indonesia dalam kegiatan The First United Nations Global Congress of Victims of Terrorism di Markas Besar PBB New York pada 8-9 September 2022. ● dot



SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM DESA ANTI KORUPSI

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri (kiri) memberikan cinderamata kepada Gubernur Jawa Timur Khoffah Indar Parawansah (kanan) dalam acara sosialisasi dan bimbingan teknis program desa antikorupsi di gedung Islamic Center Surabaya, Jawa Timur, Rabu (14/9). Kegiatan tersebut dalam rangka menguatkan program anti korupsi di desa dan mendorong pelopor desa anti korupsi di Jawa Timur.

PERBERITAHUAN

- Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham perseroan terbatas PT. RICHREY ISLAND INTERNASIONAL, berkedudukan di Kota Bogor, tertanggal 9 September 2022, telah diambil keputusan mengenai pengurangan modal dasar dan modal disetor perseroan, dari semula Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) menjadi Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atas pengurangan modal perseroan tersebut, dipersilahkan untuk mengajukan keberatannya dengan menghubungi Direktur Utama Perseroan Nyonya SRI MULYATI, SH, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini.
Bogor, 11 September 2022
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN PENGAMPUAN

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 345/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Juli 2022, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

- Mengembalikan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan Terhormon ALDIYANTO SALIM dalam keadaan sakit stroke total sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri;
- Menyatakan sah secara hukum Terhormon ALDIYANTO SALIM berada di bawah pengampuan (curatele);
- Menyatakan sah secara hukum Pemohon NITA ALDIYANTO adalah sebagai pengampu dari ayah kandungnya yang bernama ALDIYANTO SALIM;
- Menyatakan sah secara hukum Pemohon NITA ALDIYANTO berhak bertindak sebagai Pengampu untuk mewakili Terhormon ALDIYANTO SALIM guna melakukan segala perbuatan hukum yang diperlukan dalam pengurusan terhadap kepentingan hukum keperdataan dan harta keluarganya Terhormon ALDIYANTO SALIM;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan pasal 444 KUHPerdata, dan diberitahukan kepada para pihak yang merasa keberatan atas Penetapan Pengadilan tersebut di atas agar menyampaikan keberatannya disertai dengan bukti-bukti yang cukup kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta selaku Pengampu Pengawas, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengumuman ini diumumkan.

Jakarta, 15 September 2022
Pengampu,
NITA ALDIYANTO